



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 14 Mei 2015

Halaman: 12

Perubahan Njeron Beteng Dimulai

Antisipasi Konflik, Disarankan Ada Sosialisasi

JOGJA - Terhitung mulai hari ini (14/5) uji coba tahap kedua penataan lalu lintas di Njeron Beteng (Keraton Jogja) bakal berlanjut atau kembali berlaku. Pada uji coba kedua ini, Pemkot Jogja mengubah larangan yang sebelumnya berlaku. Pemkot membatasi kendaraan dengan dimensi kurang dari lima meter masuk ke njeron beteng.

"Sekarang tidak bicara seat. Tapi pada dimensi panjang kendaraan," kata Wali Kota Jogja Hariyanto Suyuti (HS) kemarin (13/5). HS menegaskan, larangan yang berlaku mutlak adalah untuk

bus besar. Bus besar tak boleh masuk ke area cagar budaya, tapi harus parkir di Taman Khusus Parkir (TKP) Ngabean atau TKP Senopati.

"Kalau bus kecil yang panjangnya kurang dari lima meter, boleh masuk. Sebaliknya, kalau parkir di tepi jalan umum, akan ditinggalkan. Karena memang dilarang," tandas HS.

Ia menambahkan, perubahan ini merupakan hasil kajian tim evaluasi selama ini. Dalam kajian tersebut, Pemkot Jogja memastikan mempertimbangkan berbagai masukan. Termasuk dari pengelola "Si Thole" yang bakal merasakan dampak langsung dari perubahan kebijakan ini.

"Sudah semua. Pertimbangan kami lakukan dengan matang dan

mendengarkan masukan semua pihak," lanjut HS.

Mengenai rencana uji coba tahap kedua ini, HS menegaskan, pihaknya tak mematok waktu. Pemkot akan mematenkan kebijakan ini jika tak ada gejolak di masyarakat.

Sementara itu, perubahan kebijakan uji coba lalu lintas di njeron beteng menuai kritik dari kalangan wakil rakyat. DPRD Kota Jogja mendesak pemkot tak sepele-pengal dalam menata kawasan cagar budaya. Pemkot Jogja wajib membuat konsep penataan njeron beteng. Beserta, tahapan setiap penataan.

"Masyarakat sudah bosan dengan desain yang berubah-ubah di Malloboro. Apalagi ini di Keraton, jelas rentan terjadi gesekan di masyarakat," ujar Wakil Ketua I

DPRD Kota Jogja Ali Fahmi, kemarin (13/5).

Fahmi menegaskan, masalah utama penataan di njeron beteng yang mengundang penolakan dari kalangan pelaku pariwisata, adalah sosialisasi. Pelaku pariwisata tak mengetahui sejauh mana rencana penataan tersebut.

"Tahu-tahu ada larangan masuk ke njeron beteng. Tanpa ada sosialisasi. Ini kan yang menimbulkan penolakan," tutur politikus dari PAN ini.

Fahmi mengungkapkan, sebenarnya jika pemkot telah memiliki konsep besar penataan di njeron beteng, harus dilakukan sosialisasi. "Sosialisasi detail sampai setiap tahapan yang akan dilakukan pemkot. Sehingga, warga dan stake holder di njeron beteng mengetahui," tuturnya.

Dikatakan, sosialisasi memiliki peran penting. "Dengan sosialisasi, kalau ada yang tidak pas, masyarakat bisa memberikan masukan. Ini agar mereka bisa handarbeni terhadap penataan itu," tuturnya.

Diakuinya, pemkot memiliki tujuan baik terhadap rencana penataan njeron beteng, dan masyarakat bisa merasakan akses yang nyaman. Begitu pun dengan wisatawan.

Sehingga, jika kedua hal tersebut bisa bertemu, Fahmi yakin, setiap penataan yang melibatkan masyarakat tak akan menimbulkan kontroversi. "Warga Kota Jogja karakternya rasional. Jika penataan itu menguntungkan mereka, pasti didukung. Bahkan, diamanakan kebijakan dari pemkot itu," jelasnya. (eri/jko/ty)

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005